

**AKUNTABILITAS DAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID MELALUI  
PENDEKATAN FENOMENOLOGI (STUDI KASUS PADA YAYASAN MASJID  
BAITURRAHMAN PAKUSARI - JEMBER)**

**Ibna Kamilia**

Universitas Muhammadiyah Jember  
[vivi.habibie@yahoo.com](mailto:vivi.habibie@yahoo.com)

**Pujiarti**

Universitas Muhammadiyah Jember  
[pujiarti47@yahoo.co.id](mailto:pujiarti47@yahoo.co.id)

***Abstract:** This research shows that the importance of accountability in financial statements. The objectives to be achieved, namely to look on the side of the financial statements at the Baiturrahman mosque has been appropriate or not in accordance with the applicable standard. This research uses descriptive qualitative approach to Phenomenology. Phenomenology of approach used to understand in depth the activity to finance existing in the mosque of Baiturrahman Pakusari, Jember. These studies gain exposure of accountability both for their fellow human beings as well as accountability to God Almighty, in accordance with the understanding and the fact that in the natural by stewards. With regard to the financial statements, the mosque of Baiturrahman Pakusari, Jember still do not meet the financial statement components in accordance with PSAK Number 45. At the Baiturrahman Mosque just present the report simply because of limited human resources. So, researcher makes financial statements that comply with the PSAK Number 45 of document that researchers get.*

***Keywords:** Accountability, Financial Statements, PSAK Number 45, The Phenomenology of Approach*

## **1. PENDAHULUAN**

Seiring berjalannya waktu, organisasi sektor publik saat ini dituntut untuk mampu mengefisienkan biaya ekonomi maupun biaya sosial yang dikeluarkan untuk suatu aktivitas yang dilakukannya. Berbagai tuntutan tersebut akhirnya membuat akuntansi sebagai suatu ilmu yang dibutuhkan

untuk membantu organisasi mengelola semua urusan-urusan yang berhubungan dengan publik. Hal ini memunculkan suatu ilmu akuntansi baru yang saat ini dikenal oleh masyarakat sebagai akuntansi sektor publik.

Adapun dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan organisasi sektor publik dapat dengan mudah ditemui dan dilihat di sekitar kita. Institusi pemerintahan baik Pusat maupun Daerah, partai politik, tempat-tempat peribadatan, sekolah, yayasan, dan LSM adalah organisasi sektor publik. Semua organisasi tersebut menyediakan pelayanan bagi masyarakat seperti pendidikan, listrik, peribadatan, dan jasa-jasa lainnya dalam kerangka pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Selain memberikan pelayanan, semua aktivitas lembaga baik pemerintah maupun swasta selalu dituntut transparansi dan akuntabilitas. Ini merupakan keniscayaan karena transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci paling penting bagi suatu entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya dimana entitas tersebut berada (Simanjuntak dan Januarsi, 2011).

Dilihat dari jenis usahanya, organisasi sektor publik digolongkan menjadi 2 macam, yaitu organisasi yang berorientasi pada laba (*profit oriented*) dan organisasi nirlaba (*nonprofit oriented*). Organisasi yang berorientasi pada laba merupakan suatu proses

kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yakni untuk menghasilkan laba. Organisasi nirlaba merupakan sebuah organisasi yang didirikan tidak bertujuan untuk memperoleh laba.

Organisasi keagamaan merupakan salah satu organisasi yang dianggap khusus dari organisasi nirlaba lainnya. Kekhususan tersebut dapat dilihat dari segi penyelenggaraannya. Menurut buku Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik karangan Indra Bastian (2007 : 216-217) menyatakan bahwa dari segi penyelenggaraannya, organisasi keagamaan dijalankan oleh sebuah lembaga atau organisasi yang muncul atas kesadaran akan berjalannya visi dan misi agama tersebut. Organisasi keagamaan mengacu pada organisasi dalam bentuk tempat ibadah, seperti Masjid, Gereja, Pura, Wihara, dan organisasi yang dibentuk sebagai tempat belajar agama seperti pesantren, serta organisasi lainnya yang bergerak dalam bidang keagamaan.

Yayasan Masjid Baiturrahman Patemon Pakusari merupakan salah satu dari sekian banyak masjid di Jember yang masuk dalam daftar di

Kementerian Agama Republik Indonesia. Masjid dengan Akta Notaris Nomor 12/2001-13 Agustus 2001 ini didirikan di tanah wakaf dan dibangun pada tahun 1994. Tetapi, meskipun telah terdaftar di Kementerian Agama dan termasuk sebagai organisasi nirlaba yang seharusnya mencatat dan melaporkan keuangan secara jelas dan terperinci, namun Masjid Baiturrahman sampai saat ini masih belum mampu menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan (PSAK Nomor 45). Hal ini dikarenakan para pengurusnya berpendidikan hanya sampai SMA dan sederajat.

Salah satu contoh ketidaksesuaian penyajian dalam laporan keuangan Masjid Baiturrahman adalah belum dilaporkannya pendapatan dari “kotak amal Baiturrahman” yang dibawa keliling oleh lansia dan anak-anak untuk meminta sumbangan di perumahan sekitar masjid. Pendapatan yang diungkapkan sebagian besar hanya pendapatan dari infak Sholat Jumat sehingga membuat masyarakat menjadi lebih penasaran akan pengelolaan keuangan Masjid Baiturrahman tersebut.

Dengan keadaan tersebut maka lewat kajian ini, peneliti ingin

mendalami bagaimana sebenarnya kondisi keuangan di Yayasan Masjid Baiturrahman Patemon, baik dalam pencatatannya maupun pelaporannya lewat penelitian yang berjudul “Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid melalui Pendekatan Fenomenologi”.

## **2. LANDASAN TEORI**

### **2.1 *Clash of Jurisdictional***

Teori *clash of jurisdictional* menyatakan profesionalitas sebuah profesi seringkali tidak dapat dipahami oleh profesi lainnya yang berbeda sehingga profesionalitas sebuah profesi teralienasi dari profesi lainnya (Abbot, 1988). Hal ini terjadi karena sistem secara praktik dan nilai memiliki perbedaan antara satu profesi dengan profesi lainnya, masing-masing profesi ingin membuktikan bahwa mereka ahli dan sangat menguasai wilayah profesinya dibandingkan dengan orang lain, sehingga tidak memungkinkan bagi orang lain untuk masuk dan melakukan profesi yang mereka kuasai. Dalam konteks penelitian ini, terdapat dua profesi yang berbeda perspektifnya yaitu ruang kerja akuntan (melalui praktik dan ilmu akuntansi) dan agamawan atau ustadz atau pengurus masjid.

## **2.2 Fenomenologi**

Fenomenologi menurut Husserl yang dikutip di dalam Mujiyanto, dapat memberikan pengetahuan yang perlu dan esensial mengenai apa yang ada. Adian (2005) juga menjelaskan bahwa Fenomenologi adalah ilmu tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari obyek-obyek sebagai korelat kesadaran. Bungin (2001) dalam Reza (2012) mengatakan bahwa fenomenologi merupakan gejala dalam situasi alamnya yang kompleks yang hanya terjadi pada bagian alam kesadaran manusia, sekomprensif apapun ketika telah direduksi ke dalam suatu parameter yang terdefiniskan sebagai fakta. Dengan demikian, fenomenologis merupakan sebuah metode yang dapat mengungkap kesadaran paling dalam tentang suatu hal, fenomenologis bertujuan untuk memahami respon manusia terhadap pengalaman yang telah dilaluinya.

## **2.3 Laporan Keuangan Nirlaba (Berdasarkan PSAK Nomor 45)**

### **2.3.1 Laporan Posisi Keuangan**

Laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih serta

informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Komponen dalam laporan posisi keuangan mencakup: 1. Aset; 2. Liabilitas; dan 3. Aset bersih (aset bersih tidak terikat, aset bersih terikat temporer dan aset bersih terikat permanen).

### **2.3.2 Laporan Aktivitas untuk Suatu Periode Pelaporan**

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih, hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Perubahan aset bersih dalam laporan aktivitas biasanya melibatkan 4 jenis transaksi, yaitu: pendapatan, beban, *gains dan losses*, dan reklasifikasi aset bersih.

Secara umum, ketentuan dalam laporan aktivitas adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan disajikan sebagai penambah aset bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang.
2. Beban disajikan sebagai pengurang aset bersih tidak terikat.

3. Sumbangan dapat disajikan sebagai penambahan aset bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan.
4. Jika ada sumbangan terikat temporer yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, maka sumbangan tersebut dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.
5. Keuntungan dan kerugian dari investasi dan aset (atau kewajiban) lain diakui sebagai penambah atau pengurang aset bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.
6. Selain dari ketiga jenis aset bersih yang ada sebagaimana dijelaskan sebelumnya, organisasi nirlaba tetap berpeluang untuk menambah klasifikasi aset bersih sekiranya diperlukan. Klasifikasi ini bisa dilakukan menurut kelompok operasi atau non-operasi, dapat dibelanjakan atau tidak dapat dibelanjakan, telah direalisasi atau belum direalisasi, berulang atau tidak berulang, atau dengan cara lain yang sesuai dengan aktivitas organisasi.

### 2.3.3 Laporan arus kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Adapun klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas pada laporan arus kas organisasi nirlaba, sama dengan yang ada pada organisasi bisnis, yaitu: arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Metode penyusunan laporan arus kas pun bisa menggunakan metode langsung (*direct method*) maupun metode arus kas tidak langsung (*indirect method*).

### 2.3.4 Catatan atas laporan keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan rincian atau penjelasan dari aktivitas yang mana tidak tercantum dalam laporan-laporan sebelumnya.

Dari keempat jenis laporan tersebut, dapat dicermati bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba mirip dengan organisasi bisnis, kecuali pada 2 hal utama, yakni:

1. Organisasi nirlaba tidak memiliki laporan laba atau rugi, namun laporan ini dapat dianalogikan dengan laporan aktivitas. Informasi sentral

dalam laporan laba rugi umumnya terletak pada komponen laba atau rugi yang dihasilkan organisasi bisnis dalam satu periode.

2. Organisasi nirlaba tidak memiliki laporan perubahan ekuitas sebagaimana layaknya organisasi bisnis. Hal ini disebabkan organisasi nirlaba tidak dimiliki oleh entitas manapun. Ekuitas dalam organisasi nirlaba bisa dianalogikan dengan aset neto yang akan disajikan pada laporan aktivitas. Aset neto tersebut terdiri dari:

- a. Aset neto tidak terikat, adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.
- b. Aset neto terikat temporer, adalah sumber daya yang pembatasan penggunaannya dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
- c. Aset neto terikat permanen, adalah sumber daya yang pembatasan penggunaannya dipertahankan secara permanen. Namun demikian, organisasi nirlaba diijinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan

atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Contoh aset ini adalah warisan atau wakaf.

#### **2.4 Akuntabilitas**

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
- b. Pertanggungjawaban vertikal, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Dalam hal keagamaan, pertanggungjawaban vertikal tertuju pada Allah SWT.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Metode ini digunakan karena penelitian ini memberikan gambaran tentang praktek akuntabilitas dan wujud transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid.

#### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara dengan maksud tertentu. Wawancara ada tiga jenis yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yang mana wawancara dilakukan kepada bendahara masjid serta pengurus yang lain untuk mendapatkan data primer berupa sejarah berdirinya masjid, struktur organisasi, aktivitas operasional dan data sekunder

berupa laporan keuangan serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Masjid Baiturrahman.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data atau mengevaluasi catatan-catatan seperti laporan kegiatan maupun dalam bentuk laporan keuangan.

#### **3.3 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini berupa:

a. Data Primer, yang diperoleh lewat wawancara dengan pengurus masjid.

b. Data Sekunder, yang diperoleh lewat kajian laporan keuangan serta dokumen yang berkaitan.

#### **3.4 Jenis Data**

a. Data Subjek

Data subjek adalah jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Data subjek dengan demikian merupakan data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden yang mana dalam penelitian ini berupa opini dari pengurus masjid.

b. Dokumenter

Data dokumenter menurut Indriantoro dan Supomo (2009:146) adalah jenis data penelitian berupa faktur, jurnal, surat-surat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah laporan keuangan Masjid Baiturrahman.

### **3.5 Teknik Analisis**

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan peneliti lakukan dalam teknik analisa data penelitian ini meliputi:

1. Langkah pertama adalah menyiapkan data-data empiris hasil pengamatan yang sudah dilakukan peneliti.
2. Langkah kedua adalah menjelaskan prosedur pengelolaan keuangan pada yayasan Masjid Baiturrahman.
3. Langkah ketiga yang dilakukan peneliti adalah menjawab nilai-nilai yang terkandung dalam fenomena dibalik proses pengelolaan keuangan yang telah diuraikan. Adapun langkah yang dilalui untuk mendapat jawaban yaitu dengan menggunakan metode fenomenologi yang meliputi:
  - a. *Epoche*, peneliti tidak melibatkan penelitian dengan pengalaman pribadi peneliti (netral)

b. Reduksi Fenomenologi, dalam tahapan ini peneliti bisa menemukan inti penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan persepsi.

c. Variasi Imajinasi, dalam tahapan ini peneliti mulai menggali tema-tema pokok dari fenomena yang muncul.

d. Sintesis makna dan esensi, menggambarkan kondisi fenomena yang dialami objek penelitian secara keseluruhan.

4. Tahap keempat, hasil jawaban dari langkah ketiga dikonstruksi dengan PSAK Nomor 45.
5. Tahap kelima yaitu menarik kesimpulan.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Keadaan Keuangan Masjid Baiturrahman**

Masjid Baiturrahman merupakan masjid yang dikelola secara tradisional sebagaimana masjid-masjid di banyak kampung di Indonesia. Laporan keuangan yang disusun oleh pengurus masjid Baiturrahman masih sangat sederhana, yaitu berupa catatan tentang pemasukan dan pengeluaran keuangan saja. Selain itu, berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh lembaga masjid juga



tidak digolongkan menjadi aset lancar dan tidak lancar serta juga belum membuat neraca. Sehingga peneliti mengkonstruksi data keuangan yang ada agar sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu PSAK Nomor 45.

#### 4.2 Akuntansi Masjid dan *Clash of Jurisdictional*

Dalam lembaga Masjid Baiturrahman, dari sisi agamawan tidak terlihat adanya penolakan terhadap eksistensi akuntansi yang digunakan secara benar di masjid. Justru mereka mendorong pemanfaatan akuntansi karena sadar bahwa Islam mengajarkan kejujuran dan keterbukaan serta semua aktivitas terhadap sesama manusia harus dipertanggungjawabkan.

#### 4.3 Penerapan Akuntabilitas terhadap Sesama Manusia

Penerapan nilai akuntabilitas terhadap manusia yang ada di Masjid Baiturrahman meliputi:

- a. Penerapan praktik akuntabilitas hukum dan kejujuran.
- b. Penerapan praktik akuntabilitas program
- c. Penerapan akuntabilitas proses
- d. Penerapan akuntabilitas kebijakan
- e. Penerapan akuntabilitas *financial*

#### 4.4 Penerapan Akuntabilitas terhadap Allah SWT

Bentuk akuntabilitas para pengurus masjid kepada Sang Pencipta meliputi:

##### a. Amanah

Amanah yang dilakukan oleh masjid Baiturrahman seperti halnya tidak mempergunakan uang masjid untuk keperluan pribadi.

##### b. Ikhlas

Para pengurus masjid Baiturrahman juga telah menerapkan nilai keikhlasan dalam melakukan tanggungjawab yang diberikan tanpa adanya imbalan dalam mengelola.

#### 4.5 Penjabaran Pendekatan Fenomenologi

##### a. Reduksi Fenomenologi

Dari hasil pengamatan dan keikutsertaan peneliti saat terjun di Masjid Baiturrahman, bisa ditemukan inti dari penelitian yang peneliti lakukan yaitu berupa keadaan keuangan masjid, ketransparansian dalam menyampaikan informasi serta keakuntabilitasan dalam pelaporan keuangan.

##### b. Variasi Imajinasi

Dalam tahap ini peneliti melakukan wawancara terhadap pengurus masjid mengenai keadaan keuangan,

pemahaman mereka terhadap ketransparansian dan akuntabilitas masjid yang seharusnya.

### c. Sintesis Makna dan Esensi

Kondisi secara keseluruhan tentang Masjid Baiturrahman masih sederhana, akan tetapi dibalik kesederhanaan itu secara global wujud dari ketransparansian dan akuntabilitas masjid sudah baik.

## 4.5 Pencatatan Laporan Keuangan yang Sesuai PSAK Nomor 45

### a. Laporan posisi keuangan

Yayasan Baiturrahman		
Masjid Baiturrahman Patemon - Jember		
Laporan Posisi Keuangan		
Per 31 Desember 2016		
<b>Aktiva</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas		<u>159.250</u>
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>159.250</b>
<b>Aset Tetap</b>		
Perlengkapan	8.142.000	
Bangunan	450.000.000	
Tanah	<u>500.000.000</u>	
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b><u>958.142.000</u></b>
<b>Jumlah Aktiva</b>		<b><u>958.301.250</u></b>
<b>Aset Neto</b>		
Aset tidak terikat	159.250	
Aset terikat temporer	8.142.000	
Aset terikat permanen	<u>950.000.000</u>	
<b>Jumlah Aset Netto</b>		<b><u>958.301.250</u></b>

Sumber : Data diolah berdasarkan PSAK Nomor 45

### b. Laporan Aktivitas

Yayasan Baiturrahman		
Masjid Baiturrahman Patemon – Jember		
Laporan Aktivitas		
Per 31 Desember 2016		
<b>Perubahan Aset Neto Tidak Terikat</b>		
<b>Pendapatan</b>		
Infaq Jum'atan		42.722.500
Donatur –SMA Arjasa		300.000
Hadrah		<u>200.000</u>
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>43.225.500</b>
<b>Biaya Operasional</b>		
Biaya bulan Januari	2.437.000	
Biaya bulan Februari	4.614.500	
Biaya bulan Maret	4.360.000	
Biaya bulan April	2.687.000	
Biaya bulan Mei	2.491.000	
Biaya bulan Juni	3.177.000	
Biaya bulan Juli	5.575.000	
Biaya bulan Agustus	6.876.500	
Biaya bulan September	3.718.500	
Biaya bulan Oktober	4.149.000	
Biaya bulan Nopember	3.582.500	
Biaya bulan Desember	<u>3.575.500</u>	
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b><u>47.244.000</u></b>
<b>Penurunan Aset Neto Tidak Terikat</b>		<b><u>(4.018.500)</u></b>
<b>Aset Neto Tidak Terikat Awal Tahun</b>		<b>4.177.750</b>
<b>Aset Neto Tidak Terikat Akhir Tahun</b>		<b>159.250</b>

Sumber : Data Diolah berdasarkan PSAK Nomor 45

**c. Laporan Arus Kas**

Yayasan Baiturrahman	
Masjid Baiturrahman Patemon, Jember	
Laporan Arus Kas	
Per 31 Desember 2016	
<b>Arus Kas Aktivitas Operasi</b>	
Kas Dari Pendapatan Infaq Jumat	42.722.500
Kas Dari Donatur	300.000
Kas dari Hadrah	200.000
Kas untuk Gaji Jaga&Rawat Masjid	(3.600.000)
Kas untuk Biaya Listrik dan Air	<u>(4.722.000)</u>
<b>Kas Neto untuk Aktifitas Operasi</b>	<b>34.900.500</b>
<b>Arus Kas Aktivitas Investasi</b>	
Pembelian Al-Qur'an	(100.000)
Pembelian Kaset	(45.000)
Pembelian Lampu dan Gembok	(55.000)
Pembelian Alat Pel Lantai	(50.000)
Pembuatan Kotak Amal	<u>(150.000)</u>
<b>Kas Neto untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(400.000)</b>
<b>Arus Kas Aktivitas Pendanaan</b>	
	—

Sumber : Data Diolah berdasarkan PSAK Nomor 45

**d. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan mengenai kebijakan yang tidak dicantumkan dalam laporan keuangan lainnya. Berikut Catatan Atas Laporan Keuangan Masjid Baiturrahman.

1. Prinsip penyajian

Laporan keuangan ini disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang “Pelaporan keuangan organisasi nirlaba”. Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode arus kas langsung.

2. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari donatur diakui pada saat diterima dan beban diakui pada saat terjadinya.

3. Aset Neto

a. Aset Neto Tidak Terikat:

Jumatan = Rp. 42.722.000  
Donasi SMA Arjasa = Rp. 300.000  
Pemasukan Hadrah = Rp. 200.000

b. Temporer

Perlengkapan = Rp. 8.142.000

c. Terikat Permanen

Wakaf Tanah = Rp. 500.000.000

Bangunan = Rp. 450.000.000

Nilai nominal dari wakaf tanah, bangunan serta perlengkapan, peneliti peroleh dari nilai taksiran Takmir masjid.

**5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

**5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dari pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

a. Laporan keuangan yang disusun oleh Masjid Baiturrahman hanya berupa

laporan pemasukan dan pengeluaran. Untuk pencatatan mengenai aset tidak dicatat ke dalam laporan keuangan, sehingga nilai aset peneliti taksir bersama dengan ketua Takmir Masjid Baiturrahman.

- b. Meskipun pelaporan hanya berupa pemasukan dan pengeluaran, tetapi secara keseluruhan akuntabilitas dan ketransparansian dari pengelolaannya sudah cukup baik.
- c. Laporan keuangan yang disusun oleh Masjid Baiturrahman tidak sesuai dengan PSAK Nomor 45. Dikarenakan hal tersebut, maka peneliti mengkonstruksi laporan keuangan yang sesuai berdasarkan ketentuan PSAK Nomor 45 secara keseluruhan, mulai dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- d. *Clash Jurisdictional* tidak terjadi pada kasus Masjid Baiturrahman, justru para pengurus yang mengelola masjid mendorong dan menginginkan kehadiran profesi akuntan untuk mendesain penggunaannya keuangan masjid agar dapat membantu perbaikan kinerja masjid dalam melakukan peran-peran dakwah dan

membangun konstruksi sosial ditengah masyarakat islam.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Data laporan keuangan yang peneliti gunakan untuk mengkonstruksi ke dalam PSAK Nomor 45 sangat terbatas, karena selama ini pihak Masjid Baiturrahman hanya menyediakan atau membuat data laporan pemasukan dan pengeluaran kas saja.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka dengan ini peneliti menyarankan kepada:

- a. Pengurus masjid, khususnya Bendahara untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 45 seperti yang dibuat oleh peneliti, antara lain: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan.
- b. Untuk peneliti selanjutnya, pendekatan Fenomenologi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk riset dengan objek yang lain.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abbott.A. 1988. *The system of professions: An Eassy of the Division of Expert Labour*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Adian, Donny Gahral. Pengantar Fenomenologi. Depok: Koekoesan, 2010
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Yogyakarta: Erlangga
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2000. *Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45*. Jakarta: PSAK-IAI.
- Haekal Reza. 2012. *Mengangkat Nilai “Zakat Dengan Hati”: Refleksi Fenomenologis Zakat Perusahaan Pengusaha Arab*. Jurnal Multiparadigma Volume 3 Nomor 1 2012.
- Nur, Indriantoro dan Bambang, Supomo. 1999. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen Edisi pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Simanjuntak, D.A. dan Januarsi, Y. 2011. *Akuntabilitas Dalam Perspektif Gereja Protestan*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi, Vol. 14, Nomor 7.